

“Njagani Plesiran” Upaya Adaptasi Kenormalan Baru Di Klenteng Agung Sam Poo Kong Semarang

Syahrul Akbar*, Evi Noviyanti, Ute Lies Siti Khadijah, Dadang Suganda

Program Studi Magister Pariwisata Berkelanjutan
Sekolah Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung

*syahrul19001@mail.unpad.ac.id

Informasi Artikel

Received: 26 Mei 2021

Accepted: 7 Maret 2022

Published: 31 Maret 2022

Keywords:

Covid-19, Tourism Crisis, Klenteng Agung Sam Poo Kong, Njagani Plesiran, Public Policy

Abstract

As one of the largest industries in the world, tourism has become a rapidly growing phenomenon, yet this industry is very vulnerable to its surrounding issues, including the current Covid-19 pandemics. The travel restriction imposition has made Central Java government reconsider about its initial tourism development strategies as they need to minimise the spread of the virus while trying to accelerate the tourism sector. To implement this adjusted tourism strategies, based on policy analysis taken by the Central Java Provincial Government and its applications in the field, a tourism program named “Njagani Plesiran” was launched. This jargon “Njagani Plesiran” was derived from local Javanese language which literally means maintaining tourism activities. This study uses a literature study method in analysing the tourism policies. To ensure the effectiveness and efficiency of the implementation of the Njagani Plesiran, the Great Chinese Temple Sam Poo Kong promotes the programmes through various media channels. The expected impact of this tourism program implementation is that while local mobility within the country is still allowed yet regulated, allowing tourism businesses to remain open, the spread of Covid-19 in tourist destinations can be controlled and eventually prevented.

Kata Kunci:

Covid-19, Krisis Kepariwisata, Klenteng Agung Sam Poo Kong, Njagani Plesiran, Kebijakan Publik

Abstrak

Pariwisata menjadi fenomena yang berkembang dengan pesat sehingga tercatat sebagai sektor industri jasa terbesar di dunia. Namun demikian, pariwisata memiliki kerentanan yang tinggi terhadap ancaman krisis. Saat ini efek pandemi Covid-19 telah meluluhlantakkan sektor pariwisata dan perjalanan di Jawa Tengah. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apa strategi yang diambil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menggeliatkan sektor pariwisata namun tetap bisa menekan penyebaran pandemi Covid-19 di destinasi wisata, serta bagaimana penerapannya di Klenteng Agung Sam Poo Kong. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi alternatif jawaban dari dua pertanyaan tersebut berdasarkan analisis kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta penerapannya. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur untuk menganalisis kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil analisis penerapan *Njagani Plesiran* di Klenteng Agung Sam Poo Kong diketahui bahwa kebijakan *Njagani Plesiran* dikeluarkan sebagai alternatif solusi untuk mengatasi masalah akibat Covid-19 di daya tarik wisata. Untuk memastikan efektifitas dan efisiensi penerapan *Njagani Plesiran* Klenteng Agung Sam Poo Kong melakukan sosialisasi melalui berbagai kanal media. Dampak yang diharapkan dari penerapan kebijakan ini, di satu sisi usaha pariwisata dapat beroperasi dan di sisi lain penyebaran Covid-19 di destinasi wisata dapat dicegah.

PENDAHULUAN

Pariwisata menjadi fenomena yang berkembang dengan pesat dan sehingga tercatat sebagai sektor industri jasa terbesar di dunia (Yazdi, 2012). Pariwisata memainkan peranan penting di sebuah destinasi wisata serta dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan di bidang sosial, ekonomi dan politik (Wulung et al, 2021). Di sisi lain pariwisata juga dapat menjadi sarana yang mendorong pemahaman berbudaya yang lebih komprehensif dengan meningkatkan kesadaran dan kepedulian penduduk lokal untuk menghargai warisan kebudayaan, maupun tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu pariwisata telah diidentifikasi sebagai kontributor efektif untuk meningkatkan level pendapatan komunitas di pedesaan, dan berpotensi untuk meningkatkan kualitas hidup pada umumnya (Rojulai et al, 2018).

Melihat fenomena positif yang signifikan tersebut, pariwisata telah dijadikan sebagai sektor unggulan oleh Pemerintah dalam pembangunan nasional. Kegiatan pariwisata dapat mendorong terciptanya nilai transaksi ekonomi langsung (*direct economic transaction*) sebesar Rp634 triliun pada tahun 2017 di Indonesia, atau mengalami peningkatan sebesar 8,40 persen jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp584,89 triliun. Berdasarkan data yang dirilis BPS tersebut, menunjukkan bahwa potensi pariwisata dalam menggerakkan perekonomian bangsa tidak dapat dipandang sebelah mata (Badan Pusat Statistik, 2019).

Namun demikian sebagai industri jasa, pariwisata memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam, sosial, serta budaya di destinasi wisata. Menjadikan pariwisata sebagai industri yang memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman krisis. Sejalan dengan meningkatnya kemudahan perjalanan internasional yang diakibatkan oleh aktifitas pariwisata, meningkat pula risiko dan tantangan terhadap cepatnya pergerakan barang jasa, finansial,

pengetahuan, dan penyakit (Jamal & Budke, 2020). Saat ini efek pandemi Covid-19 telah meluluh lantakkan sektor pariwisata dan perjalanan (Dinarto et al, 2020). Jika dibandingkan dengan dampak yang diakibatkan oleh kasus SARS pada tahun 2002 – 2003, pandemi Covid-19 telah membuat maskapai penerbangan di seluruh dunia menderita kerugian 15 kali lebih banyak atau sebesar US\$ 113M (Soehardi et al, 2020).

Sebagai salah satu destinasi pariwisata di Indonesia, pandemi Covid-19 juga memberikan dampak negatif terhadap pariwisata baik penurunan wisatawan domestik maupun mancanegara (Oelistina, 2021). Berdasarkan data infografis dampak Covid-19 terhadap pariwisata Jawa Tengah tahun 2020 yang dirilis oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, pendapatan dari retribusi masuk ke daya tarik wisata di seluruh Jawa Tengah pada bulan Maret 2020 turun sebesar 90% dari pendapatan di bulan yang sama pada tahun 2019.

Dengan dampak yang sangat negatif dan begitu masif berdasarkan fakta di atas, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apa strategi yang diambil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menggeliatkan sektor pariwisata di satu sisi dan di sisi lainnya tetap menekan penyebaran pandemi Covid-19 di destinasi wisata serta bagaimana penerapannya di Klenteng Agung Sam Poo Kong, Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi alternatif jawaban dari dua pertanyaan tersebut berdasarkan analisis terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta penerapannya di Klenteng Sam Poo Kong.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan pariwisata melibatkan banyak pemangku kepentingan, salah satu di antaranya adalah Pemerintah. Pemerintah memiliki peran sentral dalam pembangunan

pariwisata karena secara mendasar Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menjaga kondusifitas wilayah, menyusun regulasi, serta memberikan sokongan finansial yang diperlukan dalam pembangunan pariwisata. Pembangunan perlu dikendalikan dengan kebijakan. Orientasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah berdasarkan pada aspek pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang berlandaskan pada kebutuhan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Dalam kebijakan tersebut memuat pedoman pelaksanaan dan larangan untuk memberikan kepastian tujuan pembangunan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Secara teoretis, kebijakan publik memiliki definisi yang beragam, dan kadang sering diartikan sebagai keputusan pemerintah karena kewenangan dan kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat serta tanggung jawab melayani kepentingan umum dimiliki oleh Pemerintah (Simatupang & Sukmadi, 2021). Kebijakan publik meliputi tujuan yang ingin dicapai (bertujuan mengutamakan kepentingan masyarakat), seperangkat tindakan berupa strategi yang dijabarkan dalam bentuk program atau kegiatan, tindakan yang diajukan baik individu maupun kelompok, atau masukan bagi pelaksanaan tindakan, baik di dalam maupun di luar pemerintahan (Nuryanti, 2015).

Berdasarkan sudut pandang tersebut, hanya pemerintah yang dapat menetapkan kebijakan publik, sedangkan intervensi dari pemangku kepentingan lainnya hanya dapat dilakukan sesuai dengan batas-batas kewenangannya masing-masing. Lebih lanjut, setidaknya terdapat tiga kewenangan yang dimiliki pemerintah, antara lain kewenangan untuk memberlakukan, kewenangan untuk mengesahkan, dan kewenangan untuk memaksakan pelaksanaan kebijakan publik kepada kelompok

sasaran kebijakan tersebut (Suwitri, 2014).

Kebijakan publik dapat juga didefinisikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah secara sadar, terarah dan terukur dengan melibatkan pemangku kepentingan di bidang tertentu untuk tujuan tertentu (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Sehingga untuk melaksanakan kebijakan publik secara efektif dan efisien perlu dilakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan kebijakan.

Dalam menganalisis kebijakan pemerintah, perlu juga untuk membahas bagaimana kebijakan tersebut diterapkan, karena implementasi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan setelah kebijakan tersebut disusun dan ditetapkan. Terdapat beberapa elemen penting dalam penerapan kebijakan, di antaranya sistem kerja pelaksanaan, sumber daya, dan relasi yang terkait dengan implementasi program kebijakan. Kebijakan yang telah disusun dan ditetapkan, namun tidak (dapat) dilaksanakan dapat menjadi sesuatu yang sia-sia.

Proses selanjutnya setelah kebijakan disusun dan ditetapkan adalah interpretasi kebijakan sebagai sebuah aksi yang dilaksanakan oleh seseorang ataupun kelompok pemerintah sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Sehingga, makna dari tindakan yang dilaksanakan oleh kelompok sasaran kebijakan memiliki dua implikasi, yaitu dampak yang diharapkan atau yang tidak diharapkan (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat beberapa aspek yang mempengaruhinya di antaranya: wewenang atau struktur organisasi pemerintah, komunikasi, sumber daya, dan disposisi atau sikap dari pelaksana. Sedangkan dimensinya terdiri dari konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, partisipatif, efektivitas, dan efisiensi (Suwitri, 2014).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dalam menganalisis kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Obyek dalam penelitian ini berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah untuk mempercepat penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk Instruksi Gubernur yang memuat panduan bagi masyarakat Jawa Tengah pada masa pasca-pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah.

Analisis pelaksanaan kebijakan publik tersebut dilaksanakan di Klenteng Sam Poo Kong. Klenteng Sam Poo Kong merupakan salah satu daya tarik wisata (DTW) yang berada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Keberadaan klenteng yang telah direvitalisasi secara masif pada tahun 2002 tersebut, telah menjadi salah satu ikon pariwisata di Kota Semarang. Hal ini dikarenakan Klenteng Agung Sam Poo Kong tidak hanya menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan nusantara, melainkan juga bagi wisatawan mancanegara yang ingin menjelajah lebih dalam sejarah pelayaran

Laksamana Cheng Ho ke Indonesia. Namun Klenteng Sam Poo Kong tidak lagi dibuka untuk aktivitas kunjungan wisata semenjak merebaknya pandemi Covid-19 di Kota Semarang, yang diikuti oleh keluarnya himbauan untuk menutup daya tarik wisata oleh Pemerintah, sebagai salah satu langkah preventif untuk mencegah menyebarnya Covid-19 di Kota Semarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Covid-19 Terhadap Pariwisata Jawa Tengah

Segala sektor industri maupun jasa di seluruh dunia mengalami kerugian akibat pandemi Covid-19 (Nepal, 2020; Niewiadomski, 2020). Sektor pariwisata dan perjalanan di seluruh dunia pun luluh lantak akibat serangan Covid-19 (Ateljevic, 2020; Hadi, 2020).

Berdasarkan infografis yang dikeluarkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 597 DTW ditutup total, dan 62 DTW dibuka terbatas dari total 639 DTW yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1. Dampak Covid-19 Terhadap Pariwisata Jawa Tengah

Hal ini mengakibatkan penurunan pendapatan sampai dengan bulan Maret tahun 2020 sebesar 90% jika dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya. Selain itu, tingkat okupansi kamar hotel berbintang di Jawa Tengah pada bulan Januari tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 11,77 poin atau sebesar 41,51% jika dibandingkan dengan bulan yang sama di Tahun 2019, atau sebesar 53,29%. Demikian pula halnya dengan rata-rata lama menginap hotel bintang di Jawa Tengah, pada bulan Januari tahun 2020 tercatat turun sebanyak 0,6 poin atau sebesar 1,3 malam dari bulan Januari tahun 2019 yang tercatat sebesar 1.36 malam.

Penutupan DTW tersebut juga berimbas pada pemutusan hubungan kerja tenaga kerja sektor pariwisata di Jawa Tengah. Dari total 690 DTW yang ada di Jawa Tengah, sebanyak 275 DTW yang terdampak sehingga mengakibatkan pemutusan kerja sebanyak 1.297 tenaga kerja serta 743 orang pramuwisata.

Sedangkan sebanyak 103 dari total 1.080 hotel bintang dan non bintang

terpaksa tutup sementara yang berimbas pada dirumahnya sebanyak 5.755 tenaga kerja dari total 53.747 tenaga kerja industri perhotelan. Selanjutnya, terdapat pemutusan hubungan kerja sebanyak 844 tenaga kerja dari 143 desa wisata yang terdampak dari total 511 desa wisata di Jawa Tengah.

Usaha pariwisata lainnya yang terdampak adalah wisata outbond dengan jumlah tenaga kerja terdampak sebanyak 1.107 orang yang terdiri atas 873 orang tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja, dan 234 orang tenaga kerja yang dirumahkan.

Sementara itu dari total 1.131 orang tenaga kerja industri biro dan agen perjalanan wisata hanya 84 orang tenaga kerja yang terdampak. Sebaliknya dengan usaha ekonomi kreatif, sebanyak 6.795 orang tenaga kerja terdampak, dan dari total 3.728 usaha ekonomi kreatif sebanyak 439 unit mengalami kerugian akibat pandemi Covid-19. Rincian dampak Covid-19 terhadap tenaga kerja sektor pariwisata dapat dilihat dalam gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Dampak Krisis Covid-19 terhadap Sektor Pariwisata Jawa Tengah

Mengacu pada data dan fakta akibat pandemi Covid-19 di atas, dapat diketahui bahwa sektor pariwisata memang merupakan sektor yang sangat rentan terhadap berbagai krisis. Sebagai salah satu pemangku kepentingan di bidang pariwisata, pemerintah perlu untuk melakukan perlindungan dan proteksi yang ketat terhadap industri pariwisata. Hal ini untuk memberikan jaminan keberlangsungan industri pariwisata, serta untuk menggeliatkan kembali sektor pariwisata yang luluh lantak ini.

Kebijakan Pemulihan Bencana Covid-19 di Jawa Tengah

Sebagai salah satu daerah yang terdampak akibat pandemi Covid-19, Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan kebijakan sebagai acuan masyarakat Jawa Tengah dalam rangka persiapan menuju pemulihan akibat pandemi Covid-19.

Kebijakan tersebut berupa Instruksi Gubernur yang ditujukan kepada Kepala Daerah (Bupati/Walikota) se-Jawa Tengah, serta pemangku kepentingan lainnya di Jawa Tengah. Dalam Instruksi Gubernur tersebut mengatur pedoman pelaksanaan persiapan menuju pemulihan bencana akibat Covid-19 yang terdiri dari tujuh bidang, di antaranya: Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Kesehatan, Pendidikan (Formal dan Keagamaan lainnya), Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata, dan Transportasi.

Acuan pedoman bidang pariwisata meliputi: (1) Membentuk dan mengoptimalkan pelaksanaan Tim Gugus Tugas Covid-19 di lingkungan destinasi wisata; (2) Penatalaksanaan dan pengelolaan destinasi wisata, termasuk pengelola usaha jasa akomodasi wisata, pengelola usaha jasa makanan dan minuman, pengunjung, konsumen dan wisatawan mempedomani protokol kesehatan; (3) Membudayakan pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat

Hidup Sehat (GERMAS) bagi seluruh pegawai di lingkungan destinasi wisata; (4) Penutupan sementara destinasi wisata air atau wahana air yang memiliki kontak fisik langsung; (5) Penyediaan tenaga medis atau paramedis yang representatif di destinasi wisata sebagai salah satu mekanisme tanggap darurat Covid-19.

Pedoman ini dapat ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala Daerah (Bupati/Walikota) se-Jawa Tengah, serta pemangku kepentingan lainnya di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kewenangan dan sumber daya masing-masing.

“Njagani Plesiran” Upaya Penerapan Adaptasi Kenormalan Baru di Jawa Tengah

Poin penting dalam kebijakan persiapan menuju pemulihan pasca-pandemi Covid-19 adalah masing-masing pemangku kepentingan dapat menetapkan petunjuk teknis (Juknis) pedoman persiapan masa pemulihan pasca pandemi sesuai dengan kewenangan dan sumber daya masing-masing. Berdasarkan poin tersebut, Dinas yang membidangi urusan pariwisata di Jawa Tengah telah menyusun *Standard Operational Procedure (SOP) “Njagani Plesiran ,”* yang merupakan pedoman bagi Destinasi, Industri, serta Pelaku Wisata menuju masa peralihan kenormalan baru.

Njagani Plesiran merupakan sebuah jargon bahasa Jawa yang secara harfiah berarti menjaga kegiatan berwisata. Nilai filosofis dari *tagline* ini diharapkan dapat diinternalisasi, dipedomani, dan diterapkan oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor pariwisata sehingga dapat menciptakan kondusifitas dalam aktifitas pariwisata. Tujuan ditetapkannya SOP ini adalah untuk: mempertahankan bisnis pariwisata seperti sebelum penyebaran Covid-19, mengurangi bahkan mencegah pemutusan hubungan kerja akibat Covid-19 di sektor pariwisata, serta membuka peluang lahirnya bisnis wisata sehat,

aman, higienis, pada saat implementasi kenormalan baru.

Manfaat yang dirasakan akibat ditetapkannya SOP ini antara lain bisnis pariwisata yang tetap operasional dan tumbuh meskipun di tengah pandemi melalui inovasi berkelanjutan dan penyesuaian terhadap kondisi terkini. Selain itu, budaya masyarakat yang berpegang teguh pada prinsip Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) melalui edukasi berkelanjutan di berbagai sektor pada umumnya dan sektor pariwisata pada khususnya akhirnya muncul. Dan pada akhirnya pemutusan hubungan kerja di sektor pariwisata menjadi menurun.

SOP *Njagani Plesiran* ini terdiri atas persyaratan dalam memberlakukan uji coba kenormalan baru di bidang pariwisata, SOP uji coba kenormalan baru bagi destinasi wisata, usaha jasa akomodasi, usaha jasa makanan/minuman, serta mitigasi bencana non alam.

Syarat pemberlakuan simulasi adaptasi kenormalan baru bidang pariwisata antara lain: (1) hanya berlaku bagi DTW atau Usaha Pariwisata yang telah memenuhi persyaratan Protokol Kesehatan yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI, dan bagi DTW atau Usaha Pariwisata yang memiliki penanggung jawab; (2) tidak terdapat kasus positif Covid-19 dalam waktu 14 hari sebelum

pengajuan permohonan pelaksanaan uji coba di wilayah DTW/Usaha Pariwisata dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kesehatan atau Gugus Tugas Covid-19 setempat; (3) sebelum simulasi, pengelola DTW/Usaha Pariwisata wajib mengedukasi masyarakat setempat terkait pentingnya pelaksanaan simulasi serta dampak akibat dilanggarnya protokol kesehatan; (4) peserta simulasi berjumlah maksimal 50 orang; (5) untuk melaksanakan uji coba pengelola wajib melakukan koordinasi serta melibatkan aparat keamanan; (6) Minimal simulasi dilaksanakan sebanyak dua kali, serta dokumentasi dan evaluasi setiap tahapan simulasi dilaporkan secara berjenjang; (7) pelanggaran SOP Simulasi oleh DTW/usaha pariwisata akan dievaluasi dan berimbas diberikannya sanksi dalam bentuk teguran hingga penutupan sementara.

Berdasarkan data dari Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, DTW yang telah melakukan simulasi dan sudah dibuka sebanyak 91 obyek, yang sedang simulasi dan menunggu ijin gugus tugas sebanyak 16 obyek. Berikut daftar DTW yang sudah beroperasi dan DTW yang sedang simulasi dan menunggu ijin dari Gugus Tugas.

Tabel 1. Daftar Daya Tarik Wisata yang Sudah Operasional Secara Terbatas

No	Nama Destinasi Wisata	KABUPATEN/ KOTA	No	Nama Destinasi Wisata	KABUPATEN/ KOTA
1	Sam Poo Kong	Kota Semarang	47	Tlogo Mangunan	Kab Pekalongan
2	Grand Maerakaca	Kota Semarang	48	Wana Wisata Curug Lawe	Kab Pekalongan
3	Hutan Pinus Limpa Kuwus	Banyumas	49	Wana Wisata Pendidikan Kali Paingan	Kab Pekalongan
4	Safari Offroad Adventure Baturaden	Banyumas	50	Watu Bahan	Kab Pekalongan
5	Pantai Jatimalang	Purworejo	51	Watu Bangkong Adventure	Kab Pekalongan
6	Geger Menjangan	Purworejo	52	Welo Asri	Kab Pekalongan
7	Museum Tosan Aji	Purworejo	53	Wisata Karang Srity Petungkriyono	Kab Pekalongan

No	Nama Destinasi Wisata	KABUPATEN/ KOTA	No	Nama Destinasi Wisata	KABUPATEN/ KOTA
8	Goa Seplawan (hanya gardu pandang)	Purworejo	54	Tapak Menjangan	Kab Pekalongan
9	Puncak Kayangan (Bruno)	Purworejo	55	Pasar Rindu Semilir	Kab Pekalongan
10	Taman Gunung Putri	Purworejo	56	Pantai Wonokerto	Kab Pekalongan
11	Bukit Tangkeban	Pemalang	57	OW. Ciblon Sigesing	Kab Pekalongan
12	Kampung Cubeng	Pemalang	58	La'Ranch	Kab Pekalongan
13	Jembe Kembar	Pemalang	59	Pantai Jetis	Purworejo
14	Taman Rancah	Pemalang	60	Pantai Ketawang	Purworejo
15	Bale Gandrung	Pemalang	61	Agro Wisata Amanah	Karanganyar
16	Benowo Park	Pemalang	62	Astana Giribangun	Karanganyar
17	D' Las Serang	Purbalingga	63	Astana Girilayu	Karanganyar
18	Candi Suku	Karanganyar	64	Astana Mengadeg	Karanganyar
19	Candi Cetho	Karanganyar	65	Balekambang	Karanganyar
20	Taman Saraswati	Karanganyar	66	Candi Cetho	Karanganyar
21	Hutan Skip	Karanganyar	67	Candi Suku	Karanganyar
22	Halloween	Karanganyar	68	De Tjolomadoe	Karanganyar
23	Lawu Park	Karanganyar	69	Grojogan Jumog	Karanganyar
24	Taman Satwa Taru Jurug	Surakarta	70	Grojogan Sewawar dan Sedinding	Karanganyar
25	Museum Keris	Surakarta	71	Grojogan Sewu	Karanganyar
26	Candi Borobudur	Magelang	72	Intanpari Edupark	Karanganyar
27	Gunung Kemukus	Sragen	73	Kebun Teh Kemuning	Karanganyar
28	Bengkelung Park	Kab Pekalongan	74	Lembah Katresnan	Karanganyar
29	Black Canyon Petungkriyono	Kab Pekalongan	75	Pura Pemacekan	Karanganyar
30	Buper dan Outbound Linggoasri	Kab Pekalongan	76	Puri Taman Saraswati	Karanganyar
31	Buper Lolong Asri	Kab Pekalongan	77	RM. Watu Jodo	Karanganyar
32	Curug Bajing	Kab Pekalongan	78	Rumah Atsiri Indonesia	Karanganyar
33	Curug Bidadari	Kab Pekalongan	79	Rumah Pohon Banyu Anyep	Karanganyar
34	Curug Jlarang	Kab Pekalongan	80	Senatah Tubing Adventure	Karanganyar
35	Curug Madu Resmi	Kab Pekalongan	81	Sendang Plesungan	Karanganyar
36	Curug Muncar	Kab Pekalongan	82	Situs Watukandang	Karanganyar
37	Curug Siwatang	Kab Pekalongan	83	Situs Candi Kethek	Karanganyar
38	International Batik Center	Kab Pekalongan	84	Candi Menggung	Karanganyar
39	Kampung Batik Kemplong	Kab Pekalongan	85	Candi Planggatan	Karanganyar
40	Kolam Renang Banyu Biru	Kab Pekalongan	86	Situs Metesih	Karanganyar
41	Linggoasri	Kab Pekalongan	87	Taman Sakura	Karanganyar
42	Lolong Adventure	Kab Pekalongan	88	Tawangmangu Resort	Karanganyar
43	Obyek Wisata Pantai Depok	Kab Pekalongan	89	Tubing Kali Jlantah	Karanganyar
44	Obyek Wisata Watu Ireng	Kab Pekalongan	90	Kampung Halloween	Karanganyar
45	Si Kujang	Kab Pekalongan	91	Sondokoro	Karanganyar
46	Sipare Green Park	Kab Pekalongan			

Tabel 2. Daftar DTW yang Sedang Uji Coba dan Menunggu Ijin Gugus Tugas

No	Nama Destinasi Wisata	KABUPATEN/ KOTA	No	Nama Destinasi Wisata	KABUPATEN/ KOTA
1	Owabong	Purbalingga	9	Saloka	Kab Semarang
2	Goa Lawa	Purbalingga	10	Dusun Semilir	Kab Semarang
3	Pantai Cahaya	Kendal	11	Cimory	Kab Semarang
4	Tlatar	Boyolali	12	Celosian	Kab Semarang
5	Pulau Cemara	Brebes	13	Taman Kyai Langgeng	Kota Magelang
6	Mangrove	Brebes	14	Candi Gedongsongo	Kab Semarang
7	Kaligua	Brebes	15	Bukit Cinta	Kab Semarang
8	Sikunir	Wonosobo	16	Umbul Sido Mukti	Kab Semarang

Berdasarkan data pada Tabel 1 di atas, Klenteng Agung Sam Poo Kong merupakan satu dari 91 Daya Tarik Wisata yang telah memiliki ijin operasional terbatas dari Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Jawa Tengah. Dengan demikian, Manajemen Pengelola Klenteng Agung Sam Poo Kong wajib menerapkan SOP *Njagani Plesiran* untuk menyambut wisatawan yang berkunjung. Hal ini dilakukan dengan tujuan di satu sisi selain untuk tetap menjaga agar daya tarik wisata dapat terus beroperasi, di sisi lainnya juga bertujuan untuk memutus serta mencegah penyebaran pandemi Covid-19 di destinasi wisata.

Penerapan “Njagani Plesiran” sebagai Upaya Adaptasi Kenormalan Baru di Klenteng Sam Poo Kong

Klenteng Sam Poo Kong adalah salah satu DTW yang berada di Kota Semarang. Klenteng Sam Poo Kong dikelola oleh Yayasan Klenteng Agung Sam Poo Kong dan diketuai oleh Chandra Budi Atmaja. Selain sebagai salah satu daya tarik wisata, Klenteng Agung Sam Poo Kong juga berfungsi sebagai tempat pemujaan. Setidaknya terdapat tiga tempat pemujaan yang berada di kawasan Klenteng Agung Sam Poo Kong, yaitu tempat pemujaan Dewa Bumi atau Hok Tek Ceng Sin, Sam Poo

Kong/Sam Poo Tay Djien, Tempat sembahyang Kong Hu Cu, serta Rumah Arwah Hoo Ping yang berada di lokasi Makam Kyai Djangkar.

Berdirinya Klenteng Sam Poo Kong bermula pada saat Juru Mudi Laksamana Zheng He (Cheng Ho), Wan Jing Hong, menderita sakit keras, sehingga memaksa armada laut Zheng He untuk berlabuh di sebuah pantai di Semarang (Pantai Simongan). Kemudian Armada tersebut tetap berlayar ke Timur untuk melanjutkan misi dagang dan misi damainya, sementara Juru Mudi yang sakit tersebut tetap di Goa Batu yang berada di Simongan untuk melanjutkan proses penyembuhan penyakitnya. Setelah sembuh, Juru Mudi tersebut memilih untuk tetap tinggal di Simongan, dan menggarap lahan di sekitarnya sehingga berkembang dan menjadi makmur akibat aktivitas dagang dan pertanian yang muncul di daerah tersebut. Untuk menghormati dan mengenang Laksamana Zheng He, Juru Mudinya tersebut kemudian membangun patung Zheng He di Gua tersebut pada tahun 1417. Kawasan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal tempat berdirinya Klenteng Sam Poo Kong.

Semenjak berdirinya Patung Zheng He tersebut, tempat ini telah mengalami beberapa kali pemugaran. Pada tahun 1704 Gua Batu yang menjadi

tempat berdirinya patung Zheng He runtuh akibat hujan badai dan tanah longsor. Kemudian masyarakat sekitar membangun replika Gua Batu yang berada persis di sebelah Makam Juru Mudi Wang Jing Hong. Karena situasi politik pasca kemerdekaan yang tidak menentu, pada tahun 1965 Yayasan Sam Poo Kong kemudian didirikan oleh Thio Siong Thouw. 37 tahun semenjak berdirinya Yayasan Sam Poo Kong, yakni pada Tahun 2002, mega renovasi pun dilakukan untuk mengatasi masalah berupa banjir. Dan 3 (tiga) tahun kemudian atau pada tahun 2005, mega renovasi Klenteng Agung Sam Poo Kong pun selesai dilaksanakan. Momentum ini bertepatan dengan perayaan 600 tahun kedatangan Laksamana Cheng Ho di Semarang. Setelah mengalami pemugaran, bangunan pemujaan utama untuk Sam Poo Kong memiliki tampilan baru yang lebih megah, luas dan nyaman.

Akibat pandemi Covid-19, pada bulan April 2020 Klenteng Agung Sam Poo Kong ditutup untuk umum. Sedangkan bagi umat yang akan melakukan peribadatan tetap harus mengikuti SOP dari Manajemen. Setelah mendapatkan ijin operasional terbatas dari Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Semarang. Pada tanggal 26 Juni 2020 destinasi wisata pun kembali dibuka untuk umum dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat (Hidayat & Haryono, 2021). Penerapan simulasi menuju adaptasi kenormalan baru Klenteng Agung Sam Poo Kong dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. SOP Jaga Jarak Parkir



Gambar 4. SOP jaga jarak dan menggunakan masker di Locket Tiket



Gambar 5. SOP Menggunakan Hand Sanitizer yang tersedia di loket tiket



Gambar 6. SOP Menggunakan fasilitas Cashless



Gambar 7. SOP Pengecekan suhu tubuh pengunjung di Pintu Masuk Sam Poo Kong



Gambar 8. SOP Mencuci tangan di fasilitas yang tersedia



Gambar 9. SOP Menjaga jarak antar pengunjung



Gambar 10. Penyemprotan disinfektan

Berdasarkan hasil observasi upaya menerapkan SOP Njagani Plesiran yang dilaksanakan oleh Manajemen Klenteng Agung Sam Poo Kong melalui 8 (delapan) langkah, yaitu (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020): (1) menjaga jarak parkir kendaraan; (2) Menjaga jarak dan mengenakan masker ketika mengantri di loket tiket; (3) Menggunakan cairan *hand sanitizer* sebelum melakukan transaksi di loket tiket; (4) Menggunakan fasilitas *cashless*; (5) Melakukan pengecekan

suhu tubuh pengunjung sebelum masuk ke lokasi wisata; (6) Menyediakan fasilitas cuci tangan di area wisata Sam Poo Kong; (7) Menjaga jarak antar pengunjung; dan (8) Melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala.

Dalam melaksanakan kebijakan publik yang diterapkan pemerintah, Manajemen Klenteng Sam Poo Kong juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang meliputi Tim Kimia, Biologi, Radioaktif Detasemen Gegana Satuan Brimob Kepolisian Daerah Jawa Tengah, TNI, dan Pemerintah Kota Semarang untuk melaksanakan penyemprotan disinfektan secara berkala di area Klenteng Agung Sam Poo Kong. Selain itu, Manajemen Klenteng Sam Poo Kong juga melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat, dan wisatawan atas upaya penerapan protokol kesehatan di Klenteng Agung Sam Poo Kong, melalui beberapa kanal media, seperti liputan media mainstream Metro TV, media surat kabar online, serta beberapa kanal media sosial yang dikelola oleh Manajemen Klenteng Agung Sam Poo Kong sendiri.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan *Njagani Plesiran* di Klenteng Sam Poo Kong, dapat diketahui bahwa: (1) SOP *Njagani Plesiran* merupakan kebijakan publik yang dirumuskan dan ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang memiliki orientasi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang dilandasi kebutuhan untuk menyelesaikan masalah dampak Pandemi Covid-19 terhadap daya tarik wisata (Pratiwi et al, 2021); (2) Sebagai upaya demi tercapainya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan SOP *Njagani Plesiran*, mutlak diperlukan kegiatan sosialisasi (Suprihatin, 2020). Dalam hal ini Manajemen Klenteng Agung Sam Poo Kong seperti destinasi wisata lainnya telah melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan

melalui beberapa kanal media sesuai dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Syah & Syafganti, 2021)

Saran

Berdasarkan implikasinya SOP *Njagani Plesiran* sebagai kebijakan publik terdapat dua dampak, yaitu hasil yang diharapkan dan hasil yang tidak diharapkan (Ramdhani & Ramdhani, 2017; Suwitri, 2014). Dampak yang diharapkan adalah di satu sisi usaha pariwisata tetap beroperasi dan di sisi lain penyebaran Covid-19 di daya tarik wisata dapat dicegah. Sedangkan dampak yang tidak diharapkan berupa situasi atau kondisi yang merupakan kebalikan dari dampak yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ateljevic, I. (2020). Transforming the (Tourism) World For Good And (Re)Generating The Potential ‘New Normal’. *Tourism Geographies*: 1-9.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Neraca Satelit Pariwisata Nasional. Dikase Pada 30 Desember, dari <https://www.bps.go.id>.
- Dinarto, D., Wanto, A., & Sebastian, L. C. (2020). Covid-19: Impact on Bintan’s Tourism Sector. *RSIS Commentary*, 33: 1-4.
- Hadi, S. (2020). Revitalization Strategy for Small and Medium Enterprises after Corona Virus Disease Pandemic (Covid-19) in Yogyakarta. *Journal of Xi’an University of Architecture & Technology*, XII(IV): 4068-4076.
- Hidayat, C., & Haryono, J. (2021). Analisa Korelasi Protokol Kesehatan Covid 19 Terhadap Keputusan Pembelian di Kedai Kopi Kiko, Jakarta. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 26(3): 243-251.
- Jamal, T., & Budke, C. (2020). *Tourism in A World With Pandemics : Local-Global Responsibility and Action*. *Journal of Tourism Futures*, 6(2): 181-188.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). Strategi Industri Pariwisata Dalam Menghadapi New Normal. Diakses Pada 1 Januari 2021, dari <https://chse.kemenparekraf.go.id>.
- Nepal, S. K. (2020). Travel and tourism after COVID-19 – business as usual or opportunity to reset? *Tourism Geographies*: 1-5.
- Niewiadomski, P. (2020). COVID-19: from Temporary De-Globalisation to are-discovery of Tourism?. *Tourism Geographies*, 1-6.
- Nuryanti, M. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Oeliestina. (2021). Pengaruh Jumlah Wisatawan Mancanegara Melalui Transportasi Laut, Jumlah Wisatawan Domestik Melalui Transportasi Udara dan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Bali Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 26(2): 143-152.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*: 1-12.
- Pratiwi, R., Rama, R. & Suslistiyanti, N. (2021). Building the Trust for The Tourism Destination Resiliency in New Normal Society (The Role Of Wellness Tourism System). *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, 5(1): 140-148.
- Rojulai, N., Aminudin, N., Asmalina, N., & Anuar, M. (2018). A Conceptual Framework of Tourism Development Perceived Impact, Quality of Life and Support for Tourism Further Development : A Case of Malaysia Homestay Experience Programme (MHEP) A Conceptual Framework of Tourism Development Perceived Impact, Quali. *International Journal of Academic Research in Business and Social Science*, 8(16): 339–355.
- Soehardi., Siddha, A., Hardiyono.,

- Siswanti, T., Eka, N & Hardpamungkas. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Serta Karyawan Perusahaan Penerbangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 2(2): 46-61.
- Simatupang, V., & Sukmadi. (2021). Analisis Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Kota Bandung Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Media Bina Ilmiah*, 15(16): 4669-4680.
- Suprihatin, W. (2020). Analisis Perilaku Konsumen Wisatawan Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pariwisata di Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Bestari*, 1(1): 56-66.
- Syah, F., & Syafganti, I. (2021). Kesiapan Pariwisata Depok di Era New Normal. *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1): 73-80.
- Yazdi, S. K. (2012). Sustainable Tourism. *American International Journal of Social Science*, 1(1), 50-55.
- Wulung, S. R. P., Latifah, A. I., Saidah, A. F., Ningtias, A. S., & Yasyfa, F. (2021). Dampak Covid-19 pada Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo Tengger Semeru *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 26(2): 123-132.